

ISLAM DAN CITA-CITA KEPEMIMPINAN POLITIK DI INDONESIA

Oleh: Yusdani

Pendahuluan

Di antara ironi sejarah bila dikaitkan Islam sebagai agama terbuka adalah perilaku pemimpin politik umat di berbagai negara Muslim, yang justru memakai sistem tertutup. Hanya satu dua saja negara Muslim yang dengan mantap telah menerapkan sistem kepemimpinan politik demokrasi dengan menghormati sepenuhnya asas kedaulatan rakyat. Fenomena ini sudah tentu mempunyai akar yang sangat jauh dalam rahim sejarah umat Islam. Yang jelas, tradisi ketertutupan dalam kepemimpinan politik tersebut sama sekali bukan berasal dari nabi Muhammad SAW atau generasi pemimpin yang berdekatan dengan era beliau. Budaya ketertutupan itu berkaitan dengan diperkenalkannya sistem kepemimpinan politik dinastik, yang notabene anti Islam, ke dalam sistem politik Islam sejak masa Dinasti Umayyah (Ma'arif, 1995:159). Sistem ini kemudian melanggang selama berabad-abad, sementara sampai sekarang sisanya masih dapat dilihat pada beberapa negara muslim. Dari perkembangan tersebut, tidaklah mengherankan jika kemudian didapati kenyataan bahwa dari dunia Islam, selama kurun waktu yang begitu panjang hampir-hampir tidak mampu melahirkan teori-teori kepemimpinan politik demokratik, yang membela prinsip-prinsip keterbukaan dalam negara. Para yuris abad pertengahan, sekalipun mereka sangat "concern" terhadap masalah-masalah keadilan, tidak seorang pun di antara mereka yang mampu mengartikulasikan prinsip "syura" menjadi sebuah sistem kepemimpinan politik yang membela keterbukaan. Arus sejarah kepemimpinan dinastik-otoriter begitu lama mendominasi perpolitikan di dunia Islam. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan mengapa sebagian bangsa-bangsa muslim yang memperoleh kemerdekaan pasca-Perang Dunia II bingung dalam memilih dan menetapkan sistem kepemimpinan politik yang harus mereka laksanakan; demokrasi, kerajaan, atau sistem otoriter. Sampai saat ini masalah tersebut belum pernah diselesaikan secara tuntas dan meyakinkan, baik secara teori maupun praktik. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya, bangsa Muslim Indonesia sejak masa pergerakan nasional sudah memilih sistem kepemimpinan politik demokrasi sebagai wahana yang terbaik untuk membumikan cita-cita kemerdekaan. Pilihan ini

dapat dinilai sebagai pilihan terbaik, tepat, dan benar. Oleh karena itu, organisasi-organisasi sosio-keagamaan dan sosio-politik Islam adalah sebagai pelopor utama bagi cita-cita demokrasi. Adalah suatu hal yang ironi dan memprihatinkan bahwa dalam sejarah politik bangsa Indonesia yang mayoritas muslim dan terkenal berbudaya santun itu dua kali peristiwa suksesi kepemimpinan nasional- dari Orde Lama ke Orde Baru – dari Orde Baru ke reformasi diwarnai pertumpahan darah bahkan sekarang ini cenderung anarki dan disintegratif. Inilah salah satu akibat dan bahaya bangsa yang hidup dalam alam kepemimpinan politik demokrasi yang semu dan jauh dari nilai-nilai moralitas dan etika politik kemanusiaan.

Islam : Polyinterpretable

Pada umumnya orang Islam percaya akan sifat Islam yang universal dan holistik. Sebagai sebuah instrumen untuk memahami sebuah kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada sekedar sebuah agama. Banyak yang melihatnya sebagai “masyarakat sipil” (Iqbal,1972), “peradaban yang komplit”(Gibb,1932) atau “agama dan negara” (Surur,1972: 80 dan Musa,1963: 18). Formulasi-formulasi semacam ini pada dasarnya merupakan pandangan umum bahwa Islam itu lebih dari sekedar sistem ritus. Lebih spesifik lagi, Islam tidak mengenal sekat pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan –etis- bagi setiap lapangan kehidupan. Sementara komunitas Islam percaya akan sifat universalitas dan holistik Islam, tetapi bagaimana keluasan ajaran tersebut diartikulasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan sesuatu yang problematis. Ada sementara pihak yang cenderung memahami sifat holistik Islam secara organik (Effendy,1995:6), dalam pengertian bahwa hubungan Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legal dan formal. Sedangkan di pihak lain, ada yang melihat totalitas ajaran Islam dalam dimensinya yang lebih substansif, mengutamakan - isi daripada bentuk- menjadi acuan utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Dunia Islam mengalami kesulitan dalam upaya mendamaikan dua kecenderungan yang sangat berbeda tersebut yang memungkinkan menciptakan sintesa yang harmonis antara Islam dan kepemimpinan politik, terutama sejak pudarnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, hubungan antara Islam dan kepemimpinan Negara (politik) tak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kawasan dunia Islam lainnya, seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan sebagainya. Di wilayah-wilayah itu, hubungan antara Islam dan kepemimpinan negara ditandai dengan ketegangan politik, kalau bukan permusuhan.

Menyadari posisi Islam sebagai agama mayoritas di negara-negara itu, kenyataan demikian merupakan fenomena yang mengherankan. Karena itu, banyak pengamat politik Islam mempersoalkan apakah Islam sesuai dengan sistem

kepemimpinan politik masyarakat yang konsep negara-bangsa (*nation state*) merupakan salah satu unsur utamanya? (Binder, 1963).

Cita-Cita Islam Tentang Pembangunan Masyarakat

"Tidak diragukan lagi", tulis Fazlur Rahman, bahwa tujuan sentral Alquran adalah untuk menciptakan tata sosial yang anggun dan hidup di muka bumi, yang adil dan didasarkan pada etika (Rahman, 1980:37). Dalam perspektif Islam apakah individu yang lebih penting ataukah masyarakat, tidak menjadi soal. Yang jelas antara individu dan masyarakat berkaitan. Umpamanya individu tanpa masyarakat (*a societiless individual*) (Rahman, 1980:37) tidak akan ditemukan di muka bumi ini. Yang amat ditekankan Islam ialah perlunya keamanan ontologis (*ontological security*) bagi binaan sebuah masyarakat dan peradaban yang prinsip *moral-transcendental* menjadi dasarnya yang utama. Tanpa asas moral yang kukuh ini jangan diharapkan bahwa keadilan menjadi cita-cita abadi umat sejagat akan terwujud. Konsep masyarakat mekanistik (*a mechanistic conception of society*) (Russel, 1970:8) tidak memberi peluang kepada manusia untuk menjadi manusia penuh dan bebas. Alquran sebagai dokumen moral tampaknya akan tetap mencabar otak dan hati manusia sebagai inspirasi terbesar bagi pencarian jalan keluar dari kemelut kemanusiaan pada masa-masa yang akan datang. Doktrin tentang keesaan Allah dan kesatuan umat manusia adalah doktrin sentral dalam Alquran. Dari doktrin inilah kemudian mengalir prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, dan toleransi. Amat disayangkan, doktrin-doktrin yang begini anggun yang telah berhasil dipraktikkan oleh sosok kepemimpinan Muhammad berhadapan dengan golongan elit Quraisy yang sombong dan pongah berkat kekayaan dan kekuasaan yang terenggam di tangan mereka. Doktrin yang tahan bantingan itu telah terkubur dalam abu sejarah selama berabad-abad dalam masyarakat dan peradaban umat Islam. Gerakan sosio-moral dalam Islam memang memerlukan kekuasaan kepemimpinan politik, sebab tanpa itu pembumian pesan-pesan kemanusiaannya akan mengawang. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa cita-cita sosio-moral Islam hanyalah mungkin diterjemahkan ke dalam kenyataan dan terwujud dalam kehidupan masyarakat bilamana dilindungi dan dijaga oleh pedang penolong. Pedang penolong ini tidak lain dari wilaya (organisasi politik), karena itu ia mengatakan bahwa wilaya bagi persoalan (kemasyarakatan) manusia adalah salah satu kewajiban agama yang terpenting Agama tidak mungkin tegak kukuh tanpa topangannya (Khan, 1973:33 dan 132). Doktrin tentang *amrun bi al-ma'ruf* (perintah terhadap yang baik) dan *nahyun ani al-munkar* (pencegahan terhadap yang buruk) (Q.S. 3:104, 110 dan lain-lain) merupakan asas dari bangunan kekuasaan kepemimpinan. Akan tetapi perlu dicatat bahwa kekuasaan kepemimpinan dalam Islam semata-mata bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral yang diakui bersama. Adapun kepemimpinan politik yang semata-mata untuk mempertahankan status quo kekuasaan yang korup tidak

diragukan lagi merupakan perbuatan yang amoral dari sisi perspektif kepemimpinan Islam. Bangunan kepemimpinan kekuasaan yang tercemar ini sering terlihat di panggung sejarah umat Islam dari dulu sampai sekarang, dan inilah di antara lembaran hitam yang memprihatinkan. Akan tetapi karena Alquran yang juga berfungsi sebagai kriterium pembeda antara kebenaran dan kepalsuan dan sudah merupakan hukum moral dan sejarah tetap di tengah-tengah masyarakat, kekuasaan kepemimpinan yang sudah tercemar itu pasti mendapat perlawanan. Kadang-kadang perlawanan itu bersifat demonstratif, tetapi kadang-kadang bersifat diam-diam karena iklim politik menuntut demikian. Ringkasnya adalah bahwa Islam sebagai gerakan pembaruan moral dan pembaruan masyarakat akan tetap menjadi watak agama ini. .

Keterlibatan Islam dalam mengubah wajah ruang dan waktu berdasarkan visi moral tertentu merupakan sesuatu yang inheren dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perilaku taqwa adalah buah dari iman dan persepsi moral yang tajam. Penjelasan tentang cita-cita kemasyarakatan dalam perspektif di atas, menunjukkan bahwa ide tauhid dan kemanusiaan- ide tentang satu Tuhan dan satu kemanusiaan – yang begitu sentral dalam Alquran telah memberikan ontologi bagi bangunan sebuah masyarakat dan peradaban yang hendak dibangun. Di atas landasan ontologi yang kuat, masyarakat yang hendak dibangun itu haruslah : terbuka, demokratik, toleran, dan damai. Empat ciri utama ini haruslah dijadikan acuan bagi semua gerakan pembaharuan moral dan kepemimpinan masyarakat di muka bumi ini. Islam amat mendambakan terwujudnya sebuah bangunan masyarakat yang berwajah ramah dan anggun. Dalam masyarakat dimaksud perbedaan agama, ideologi, dan nilai-nilai budaya, tidak boleh dijadikan penghambat untuk tercapainya cita-cita di atas. Ciri keterbukaan tersebut berangkat dari sifat Alquran sebagai Kitab Suci yang terbuka. Ia terbuka untuk diterima atau untuk ditolak. Sudah tentu dengan argumen-argumen yang kuat. Yang menolak Alquran tidak harus dikucilkan dari masyarakat. Islam menerima hakikat pluralisme agama dan budaya. Sikap yang harus dikembangkan bukan sikap “monopoli” kebenaran, tetapi sikap saling menghargai dan menghormati. Keterbukaan adalah watak dari sebuah perbedaan yang percaya diri. Sikap terbuka inilah pada masa lampau yang mendorong umat Islam berkenalan secara bebas dengan warisan ruhani hellenisme, Persia dan India. Adapun pada saat umat Islam telah kehilangan rasa percaya diri, sikap keterbukaan ini menjadi semakin redup. Dunia lalu menjadi amat sempit. Kemudian paham persamaan Islam pasti punya dampak terhadap kepemimpinan politik. Masyarakat Islam haruslah sebuah masyarakat yang demokratik. Sistem-sistem kepemimpinan politik yang otoriter apa lagi yang totaliter harus dinyatakan sebagai sistem kepemimpinan yang haram dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Hanya dalam sistem kepemimpinan politik demokratislah anggota masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dan bebas sampai batas-batas yang jauh untuk menjadi manusia penuh.

Dalam sistem kepemimpinan demokrasi yang diinginkan Islam, nilai-nilai intelektual dan nilai-nilai spiritual haruslah saling menopang dan saling melengkapi. Masyarakat terdidik tidak boleh tercabik-cabik oleh pertarungan antar postulat "*Cogito ergo sum*" Rene Descartes dan spiritualisme al-Ghazali. Setiap kecenderungan kearah ekstremitas harus dicegah. Demokrasi mesti punya orientasi moral. Inilah barangkali yang dimaksud Iqbal sebagai demokrasi spiritual yang menjadi tujuan tertinggi Islam (Iqbal, 1972:180) dalam kehidupan kolektif. Di bawah payung demokrasi spiritual ini masalah keadilan tidak lagi menjadi isu politik karena lawannya berupa ketidakadilan dinilai masyarakat sebagai budaya yang amat rendah dan tidak patut dilakukan oleh manusia beradab. Kepemimpinan politik demokratis memerlukan toleransi. Tanpa toleransi sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup aman dan damai. Dalam masalah toleransi ini, Islam boleh berbangga diri, khususnya terhadap kelompok non-Muslim. Dalam kasus ini, Islam normatif dan Islam sejarah seakan-akan telah menyatu. Hanyalah pada peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak punya dampak besar sajalah umat Islam boleh jadi kurang menghiraukan budaya toleransi ini. Buku-buku sejarah banyak melukiskan ketinggian budi umat Islam dalam masalah tenggang rasa ini. Tetapi yang ironis justru terletak pada kenyataan betapa sukarnya kadang-kadang dikembangkan sifat toleransi internal di kalangan umat Islam sendiri, khususnya dalam kepemimpinan politik. Di kawasan ini iklim psikologi umat memang sering rawan. Sudah cukup banyak darah yang tertumpah di kalangan sesama umat Islam, demi kekuasaan. Hal ini semuanya adalah penyakit kanak-kanak yang sukar sembuhnnya dalam sejarah Islam. Alangkah idealnya bila dalam masalah kepemimpinan politik ini dibudayakan prinsip: "Berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan". Apabila umat Islam benar-benar mau membangun dalam makna yang komprehensif, prinsip yang dikemukakan harus dijadikan landasan dalam perilaku dan kepemimpinan politik. Dalam tamansari demokrasi spiritual, tidak ada ruang untuk saling menjegal dan menggunting dalam lipatan, sebab pasti akan merobek-robek prinsip-prinsip moral yang merupakan manifestasi iman dalam kehidupan masyarakat. Kemudian untuk menjadikan umat Islam umat al-'ilm (komunitas ilmu), tidak ada pilihan lain kecuali budaya toleransi internal diwujudkan secara mantap sebagai kemestian sejarah (Ma'arif, 1995:70-71). Ciri penting terakhir dari sebuah masyarakat Islam ialah agar ia memancarkan wajah damai selaras dengan *the very root* dari perkataan Islam itu: salim, bermakna damai, sejahtera, selamat. Wajah-wajah yang mengerikan yang berlindung di balik label Islam adalah suatu pengkhianatan dan pencerobohan terhadap maksud Islam itu sendiri. Memperbaiki citra diri ini perlulah dijadikan program utama oleh seluruh gerakan Islam. Hanya sewaktu menghadapi musuh yang garang saja Islam perlu bersifat tegas dan pasti (Ma'arif, 1995:71).

Islam dan Masa Depan Kepemimpinan Politik Indonesia

Perkembangan, prospek dan masa depan kepemimpinan politik Indonesia pasca- Orde Baru akan membawa kepada berbagai implikasi. Khusus bagi perkembangan diskursus pemikiran dan praktek Islam itu sendiri. Untuk itu para pemikir dan aktivis kepemimpinan politik Islam perlu (1) mereformulasikan dasar-dasar keagamaan/teologis ke dalam bidang politik secara cerdas; (2) mendefinisikan ulang cita-cita politik; dan (3) merumuskan kembali strategi perjuangan politik Islam. Pada pembicaraan sebelumnya, telah disebutkan bahwa persoalan dasar yang dihadapi politik Islam dalam hubungannya dengan kepemimpinan negara adalah adanya kesulitan untuk membangun sintesa yang memungkinkan di antara keduanya. Faktor utama yang menyebabkan kemandekan kepemimpinan politik di Indonesia selama Orde Lama dan awal Orde Baru adalah keinginan para pemimpin politik Islam untuk membangun hubungan Islam dan kepemimpinan negara secara legalistik dan formalistik. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia sekarang perlu dikembangkan pemikiran bahwa Islam lebih mementingkan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang merefleksikan substansi ajaran Islam seperti prinsip keadilan, egalitarianisme, partisipasi, musyawarah dan sebagainya. Sejauh mekanisme tatanan kemasyarakatan dan negara diatur dengan prinsip-prinsip dasar seperti itu, yang menurut Robert N. Bellah ciri-ciri itu terdapat pada negara-kota Muhammad di Madinah (Bellah, 1991:151). Dengan demikian dasar-dasar baru kepemimpinan politik yang dikembangkan lebih berorientasi pada nilai (substansialistik) daripada bentuk dan simbol (formalistik/legalistik). Implikasi dari formulasi teologis kepemimpinan politik di atas adalah bahwa cita-cita politik Islam adalah terbentuknya sebuah sistem sosial dan kepemimpinan politik yang merefleksikan, atau sesuai dengan, nilai-nilai Islam. Karena prinsip-prinsip etis kepemimpinan politik Islam berbicara tentang keadilan (*adl*), musyawarah (*syura*), persamaan (*musawa*), bentuk sistem kepemimpinan kenegaraan yang secara substantif mencerminkan nilai-nilai Islam adalah demokrasi. Untuk itu, perumusan cita-cita kepemimpinan politik Islam masa depan di Indonesia berujung pada (1) terbentuknya mekanisme politik yang sifatnya egaliter dan demokratis; dan (2) berlakunya proses ekonomi yang lebih kurang *equitable* (Carvalo dan Dasrizal, 1983). Kenyataan bahwa jalan untuk menuju kepemimpinan Indonesia yang demokratis dan egaliter masih panjang, hal itu harus dilihat sebagai sesuatu yang memprihatinkan seluruh bangsa Indonesia. Karena watak cita-cita kepemimpinan politik Islam yang universal itu, pendekatannya pun harus bersifat integratif, dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Dengan demikian, cita-cita untuk menegakkan nilai-nilai kepemimpinan demokrasi hendaknya dilakukan di dalam kerangka sistem politik yang ada (Syadzali, 1990). Berpangkal tolak dari definisi kepemimpinan dan cita-cita politik Islam, strategi perjuangan kepemimpinan politik Islam yang dikembangkan lebih bersifat inklusif, integratif, dan diversifikatif yang dirumuskan dalam kerangka cita-cita masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa agenda ini

meliputi soal-soal demokratisasi, toleransi politik dan agama, egalitarianisme sosial-ekonomi dan partisipasi politik. Hal ini semua menunjukkan adanya sebuah transformasi yang cukup berarti dalam pemikiran dan praktek kepemimpinan politik Islam. Semua itu, baik pada tatanan teologis, cita-cita kepemimpinan politik, dan strategi pendekatannya, ditujukan untuk menghadirkan sebuah sintesa yang memungkinkan antara Islam dan kepemimpinan politik. Dalam konteks yang lebih empirik, intelektualisme dan aktivisme kepemimpinan politik dikembangkan untuk menghadirkan sebuah Islam politik yang lebih inklusif dan integratif dalam hubungannya dengan konstruk kepemimpinan negara Indonesia yang ada.

Catatan Penutup

Islam adalah agama yang *polyinterpretable* bukan tunggal. Karena itu bagi kalangan pemikir muslim yang memahami Islam secara formal legalistik pemikiran dan praktek kepemimpinan politik Islam yang mereka kehendaki adalah terciptanya hubungan Islam dan politik dalam arti luas bersifat formal legalistik. Berbeda dengan kelompok tersebut, kalangan pemikir muslim yang memahami Islam secara substantif-mereka menghendaki bagaimana nilai-nilai ajaran Islam terintegrasi dengan kehidupan kepemimpinan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini sesungguhnya pemilahan secara dikhotomik antara pemikir kepemimpinan politik muslim nasionalis sekuler dan pemikir kepemimpinan politik muslim nasionalis non sekuler di dunia Islam (termasuk Indonesia) adalah amat patut dipertanyakan, karena bagi seorang muslim mustahil menjadi seorang sekuler yang sebenarnya. Dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis dan memungkinkan antara Islam dan kepemimpinan negara untuk masa-masa mendatang akan tergantung dan dipengaruhi oleh sejauhmana kaum muslimin mampu mendamaikan antara pendekatan formal legalistik dan pendekatan substantif di atas dalam spektrum yang begitu luas.

Bangsa muslim Indonesia sejak masa pergerakan nasional sudah memilih sistem kepemimpinan politik demokrasi sebagai wahana yang terbaik untuk membumikan cita-cita kemerdekaan. pilihan ini dapat dinilai sebagai pilihan terbaik, tepat dan benar. Oleh karena itu, organisasi-organisasi sosio keagamaan dan sosio politik Islam adalah sebagai pelopor utama bagi cita-cita demokrasi kepemimpinan politik. "Almarhum" partai Masyumi dikenal orang sebagai partai mati dalam keadaan syahid dalam membela dan mempertahankan demokrasi. Syahid dalam menghadapi sistem kepemimpinan politik otoriter yang dipaksakan melalui mekanisme Demokrasi Terpimpin Orde Lama dan Demokrasi Pancasila Orde Baru yang dipaksakan beberapa puluh tahun silam.

Untuk menuju kepemimpinan politik Indonesia yang demokratis dan egaliter masih panjang, hal itu hendaklah dilihat sebagai sesuatu yang memprihatinkan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, cita-cita kepemimpinan politik Islam yang

universal itu membutuhkan pendekatan substantif yang bersifat integratif dan diversifikatif dengan melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Dengan demikian, cita-cita untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi hendaknya dilakukan dalam kerangka sistem politik yang ada. Di samping itu, untuk mencapai cita-cita politik Islam, strategi perjuangan yang dikembangkan hendaklah lebih bersifat inklusif, integratif dan diversifikatif yang diformulasikan dalam kerangka cita-cita kepemimpinan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Harapan semua pihak tentunya tidak lain agar Demokrasi Indonesia masa depan pandai-pandai belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga budaya politik tidak lagi melahirkan akrobat-akrobat politik, seperti yang dipamerkan oleh beberapa tokoh politik, beberapa waktu silam. Oleh karena itu, berdirinya banyak partai politik dengan berbagai asasnya masing-masing di era reformasi ini dalam perspektif alam demokrasi memang positif, akan tetapi perlu dihindari ekspedien dan sikap-sikap akrobat-akrobat petualang politik yang secara moral belum tentu benar dan baik bagi bangsa ini. Partai politik-partai politik muslim di Indonesia era reformasi harus menduduki garda terdepan dalam membela prinsip-prinsip demokrasi dalam kepemimpinan politik dan menghindarkan diri dari sikap eksklusivitas. Karena itu para pemikir dan aktivis kepemimpinan politik muslim perlu memformulasikan etika dan moralitas teologisnya ke dalam lapangan kepemimpinan politik, mengkaji ulang cita-cita kepemimpinan politik Islam dan meninjau kembali strategi perjuangan pemimpin politik muslim untuk menyongsong Indonesia masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. 1990. *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Masa Orde Baru*. Bandung : Mizan.
- Bakhsh, S. Khuda. 1948. *Politics in Islam*. Lahore : Muhammad Ashraf.
- Bannerman, Patrick. 1988. *Islam in Perspective a Guide to Islamic Society Politics and Law*. London and New York : Routledge.
- Bellah, Robert N.. 1991. *Beyond Belief : Essays on Religion in a Post - Traditionalist World*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.
- Binder, Leonard. 1963. *Religion and Politics in Pakistan*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.
- Boland, B. J. . 1982. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague : Martinus Nijhoff
- Carvalo, Bosco dan Dasrizal. (Ed.).1983. *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta : Leppenas.

- Dabashi, Hamid. 1989. ***Authority in Islam from the Rise of Muhammad to the Establishment of the Umayyads***. New Brunswick and London : Transaction Publisher.
- Effendy, Bahtiar. 1995. "Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia." Dalam ***Prisma*** 5 Mei 1995. Hlm. 3-28.
- . 1998. ***Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia***. Jakarta : Paramadina dan Ibnu Sina
- Enayat, Hamid. 1982. ***Modern Islamic Political Thought Response of the Shi 'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century***. London and Basingstroke : the Macmillan Press LTD.
- Gibb, H.A.R.. (Ed.). 1932. ***Moslem Whither Islam : A Survey of Modern Movements in the World***. London : Victor Gollancz Ltd.
- Hodgson, Marshal G.S. 1977. ***The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization***. Chicago and London : the University of Chicago Press.
- Hourani, Albert. 1993. ***Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939***. London : Cambridge University Press.
- Iqbal, Muhammad. 1972. ***The Reconstruction of Religious Thought in Islam***. Lahore: Muhammad Ashraf.
- Kerr, Malcolm H. 1966. ***Islamic Reform the Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida***. California and London : University of California Press and Cambridge University Press.
- Khan, Qamaruddin. 1972. ***The Political Thought of Ibn Taimiyah***. Delhi: Adam Publisher and Distributor.
- Lapidus, Ira M. . 1993. ***A History of Islamic Societies***. London : Cambridge University Press.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1995. ***Membumikan Islam***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Macdonald, Duncan. 1903. ***Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory***. New York : Charles Scribner's Sons
- Maududi, Abul A'la. 1977. ***The Islamic Law and Constitution***. Lahore : Islamic Publications Ltd.
- Mozaffari, Mehdi. 1987. ***Authority in Islam from Muhammad to Khomeini***. New York and London :M.E. Sharpe.Inc.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1963. ***Nizam al-Hukm fi al-Islam***. Cairo: Dar al-Kitab al-Arabi.

- Na'im, Abdullahi Ahmed an. 1990. ***Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights, and International Law***. New York : Syracuse University Press.
- Philpott, Simon. 2000. ***Rethinking Indonesia Postcolonial Theory Authoritarianism and Identity***. London & New York : Macmillan Press LTD & ST. Martin's Press LLC.
- Rahman, Fazlur. 1980. ***Major Themes of the Qur'an***. Minneapolis Chicago: Bibliotheca Islamica.
- Russel, Bertrand dan Rosa Russel. 1970. ***The Prospects of Industrial Civilization***. London: George Allen & Unwin.
- Smith, Wilfred Cantwell. 1951. ***Pakistan as an Islamic State***. Lahore : Shaikh Muhammad Ashraf.
- Sjadzali, Munawir. 1990. ***Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran***. Jakarta: UI-Press.
- Surur, Taha Abd. al-Baqi. 1972. ***Dawla al-Qur'an***. Cairo: Dar Nadha Mizr.
- Syamsuddin, M. Din. 2001. ***Islam dan Politik Era Orde Baru***. Pengantar Bahtiar Effendy. Jakarta : Logos.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. ***Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru***. Jakarta : Gema Insani Press.
- Watt, W. Montgomery. 1968. ***Islamic Political Thought***. Edinburgh : Edinburgh University Press.
- Yusdani, 1999. "Rekonstruksi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia" dalam ***Pilar Demokrasi***, Edisi I tahun 1/ Mei 1999. Yogyakarta : Lembaga Pers Mahasiswa FIAI UII. hal, 8-9.